**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

Nomor SOP	W.16-OT.02.01-1525
Tanggal Pembuatan	21 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	21 Maret 2025
Disahkan oleh	Kepala Kantor Wilayah, #KUMHAMPASTI JONNY PESTA SIMAMORA
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;11. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahu tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Adinistrasi Pemerintahan2. Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Layanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur Pendaftaran Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (dgip.go.id)	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Pendukung2. Komputer/Printer dan Scanner2. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Layanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan terhambat	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT**

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU		Output	KETERANGAN
		Pemohon	Petugas <i>Front Office</i>	JFU / JFT Analis KI	Kelengkapan	Waktu		
1	Menyiapkan berkas/dokumen permohonan KI dan kelengkapannya/persyaratannya.				Dokumen permohonan KI	10 menit-		
2	Menyapa pemohon dengan ramah, serta menerima konsultasi KI dengan menganalisa permohonan KI apa yang ingin di mohonkan.				Dokumen permohonan KI	20 Menit		
3	Apabila dianggap telah sesuai dengan persyaratan minimum, permohonan disampaikan kepada Analis KI untuk dianalisa lebih lanjut..				Dokumen permohonan KI	10 Menit	Dokumen permohonan KI	
4	Menganalisa lebih lanjut permohonan HKI. Apabila sesuai dengan persyaratan minimal serta pengecekan pada PDKI, selanjutnya permohonan dilanjutkan pada proses aplikasi pendaftaran HKI secara online.				Dokumen permohonan KI	15 Menit	Dokumen permohonan KI yang telah memenuhi persyaratan minimum	
7	Melakukan pendampingan pembuatan akun pada aplikasi pendaftaran permohonan KI dan/atau pendampingan <i>entry data</i> pendaftaran KI secara <i>online</i>				Dokumen permohonan KI, perangkat PC atau laptop, scanner, printer, alat tulis	10 Menit	Dokumen kelengkapan permohonan KI dan Akun permohonan pendafrtran KI	Lanjut ke Data <i>Entry</i> / Data <i>Capture</i>
8	Mencetak tanda terima permohonan/persuratan atau surat pencatatan dan memberikan kepada pemohon, memberikan survey kepuasan pelayanan publik keoadaa pemohon seraya memberikan salam, senyum, dan terima kasih				Bukti penerimaan permohonan KI / survey kepuasan pelayanan publik	5 Menit	tanda terima penerimaan permohonan/persuratan KI/ survey kepuasan pelayanan publik	
9	Menerima tanda terima dan/atau surat pencatatan permohonan KI dan meninggalkan tempat permohonan				Bukti penerimaan permohonan KI/ persuratan KI	-	Penerimaan tanda terima permohonan/persuratan KI	